

# Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan dan Efektivitas Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara)

Cecilia Lelly Kewo<sup>1</sup>, Yanti Rufaedah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado  
E-mail : ceciliakewo@unima.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Bandung  
E-mail : yrufaedah@gmail.com

## ABSTRAK

Isu yang paling mengemuka dewasa ini dalam pengelolaan administrasi publik adalah tata kelola pemerintahan yang baik atau disebut *good government governance*. Tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepemimpinan organisasi, manajemen dan pengawasan, menghasilkan intervensi yang lebih efektif, dan akhirnya mengarah pada hasil yang lebih baik dengan kehidupan masyarakat yang meningkat. Salah satu bentuk tata kelola pemerintah yaitu akuntabilitas laporan keuangan. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola pemerintah dan efektivitas audit intern terhadap kualitas laporan keuangan. Sumber data diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner serta juga studi pustaka. Data dikumpulkan dari 65 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada 8 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Data sekunder sebagai bahan perbandingan yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Data dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling* dengan metode path analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tingkat kekeliruan 0.05 maka secara parsial tata kelola pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Efektivitas audit intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan. Secara simultan tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### Kata kunci

*Tata kelola pemerintahan, audit internal, kualitas laporan keuangan*

## 1. PENDAHULUAN

Reformasi Pemerintahan dimulai sejak diperlakukan Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang semula menganut pola sentralisasi beralih menjadi desentralisasi. Daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengelola dan memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki dengan pertanggungjawaban secara nyata dan mewajibkan instansi pemerintah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Dalam perkembangannya merujuk pada UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya, penerapan asas

desentralisasi dikuatkan dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi yang merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dialihkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penerapan dua asas dimaksudkan untuk memperkuat kendali dan kontrol pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan berjalannya fungsi pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Reformasi sektor publik tersebut

dilakukan tidak hanya sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel [1].

Dalam kenyataannya, setelah lebih dari satu dasawarsa penerapan desentralisasi menunjukkan fenomena yang beragam. Di satu sisi menunjukkan hasil yang positif dibandingkan era sebelum desentralisasi seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, ransparasi serta pemberdayaan daerah secara politis, administrasi maupun ekonomi [2]. Namun di sisi lain, pemberitaan media massa mengindikasikan terjadinya peningkatan penyalahgunaan wewenang di daerah setelah desentralisasi. Desentralisasi dilakukan dengan kewenangan untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan diskresi seutuhnya masing-masing daerah tetapi pola ini menjadikan pelaksanaannya tidak sesuai dari apa yang dicita-citakan sebelumnya. Munculnya praktek dinasti penguasa di daerah serta maraknya perilaku korupsi para pejabat publik menjadikan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tak lain hanya memindahkan eksternalitas negatif dari pemerintah Fenomena mengenai belum optimalnya keseriusan upaya unit layanan dan instansi sektor layanan publik di daerah dalam memerangi korupsi dilihat hasil survey integritas publik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hasil Survey Integritas Publik menunjukkan rata-rata nilai indeks integrasi pemerintah daerah berada di bawah instansi pusat, yaitu sebesar 6,82 sedangkan instansi pusat sebesar 7,37 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013). Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih ditemukan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, yang mengakibatkan indikasi kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) unsur temuan atas kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan belum menunjukkan perbaikan yang berarti [3]. Tata kelola yang baik atau sering disebut *good government* *Good governance* merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik [4]. Belum maksimalnya tata kelola pemerintahan memunculkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya tata kelola, transparansi dan akuntabilitas [5]. Berbagai upaya memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip prinsip *good governance* di pemerintah dan masyarakat. Terkait dengan tata kelola pemerintahan (*good government governance*), survey Transparency International (2015) yang menyebutkan faktor pemicu terjadinya fraud untuk jenis korupsi (*corruption driver*) dilihat dari parameter kecepatan proses birokrasi (pelayanan publik).

Salah satu bentuk transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan publik adalah pengelolaan pembuatan laporan keuangan. Dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Sulawesi Utara masih terdapat kelemahan pengelolaan keuangan daerah, antara lain dalam sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, dan pengelolaan aset daerah. Masih terdapat pemerintah daerah yang mendapatkan opini WDP (sebesar 26,6%) antara lain Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Minahasa Selatan. Laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2017 juga menemukan masih banyak permasalahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan di propinsi, kabupaten dan kota di Sulawesi Utara [6]. Kelemahan SPI yaitu Pemprov Sulawesi Utara belum memiliki SOP / kriteria yang jelas atas kegiatan pemberian bantuan rumah sederhana layak huni kepada masyarakat, terdapat kelebihan pembayaran selain kekurangan volume senilai Rp7,29 miliar pada Pemprov Sulawesi Utara (atas pelaksanaan belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan, pekerjaan jasa cleaning service dan kegiatan dengan menggunakan jasa event organizer yang tidak sesuai dengan kontrak. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan bukti empiris dan hasil kajian mengenai pengaruh tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit intern terhadap kualitas laporan keuangan.

## 2. KAJIAN TEORI

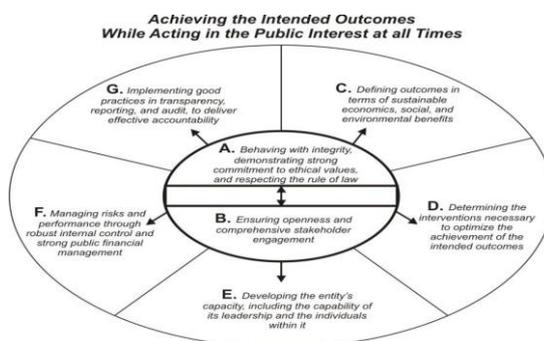
### 2.1 Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola yang baik atau sering disebut *good governance* merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. *Governance* berfokus pada mekanisme tata kelola yang merujuk pada proses lembaga formal dan institusional yang beroperasi untuk memfasilitasi tindakan kolektif dan menjaga

ketertiban umum. Konsep *governance* juga menunjuk pada penciptaan struktur atau aturan baik internal maupun eksternal merupakan hasil dari interaksi banyaknya pelaku mengatur satu sama lain [7].

Referensi [8] mengungkapkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berhubungan. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendefinisikan *good governance* adalah komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika .

Referensi [9] merumuskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah sebagai *capable, responsive, inclusive, dan transparent*. Menurut UNDP, *good or democratic governance* memerlukan partisipasi. Adanya perbaikan tata kelola harus mencakup banyak orang yang memiliki suara dalam pengambilan keputusan. United Nations menjelaskan prinsip *Good Governance* adalah *promotes equity, participation, pluralism, transparency, accountability and the rule of law*. Referensi [10] menjelaskan bahwa *good governance* mengandung empat nilai utama yaitu, *accountability, participation predictability dan transparency*. Referensi [11] mengungkapkan sejumlah karakteristik *good governance* adalah *transparent and accountable institutions, strong skills and competence, and a fundamental willingness to do the right thing*.



Gambar 1  
Prinsip Prinsip *Good Governance*. Sumber:  
IFAC, 2014

Prinsip-prinsip *Good Government Governance* yang digunakan dalam tulisan ini adalah prinsip menurut International Federation of Accountants (IFAC) tahun 2014 karena lebih terbaru dan khusus diterapkan di sektor publik. Referensi [12] menuliskan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah:

1. *Behaving with integrity, demonstrating strong commitment to ethical values, and respecting the rule of law.*

*Integrity* menurut referensi [12] adalah pemegang jabatan publik bersikap tidak terpengaruh terhadap pihak lain dalam pekerjaan mereka, tidak mengambil keputusan untuk mendapatkan keuangan atau materi yang manfaat bagi diri pihak pribadi. Lembaga harus berdiri sebagai panutan untuk mempromosikan budaya integritas dan kolaborasi seluruh entitas melalui sejumlah mekanisme, termasuk kode etik, konsultasi staf dan komunikasi, perilaku teladan, dan penilaian kinerja serta proses *reward and punishment*. Lembaga juga harus memiliki kode etik yang efektif yang menembus semua aspek operasi entitas sektor publik, misalnya pengadaan barang dan jasa, pengangkatan staf prestasi, melakukan pekerjaan tanggung jawab dengan baik, dan penggunaan dana publik untuk menguntungkan masyarakat. Mekanisme kerangka hukum yang adil dan sistem peradilan yang independen, juga dibutuhkan untuk menangani pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Aturan hukum juga merupakan sarana bagi entitas sektor publik dan individu di dalamnya untuk dapat dimintai pertanggungjawaban oleh legislatif dan masyarakat .

2. *Ensuring openness and comprehensive stakeholder engagement.*

*Openness* menurut referensi [12] adalah entitas sektor publik harus seterbuka mungkin tentang semua keputusan mereka, tindakan, rencana, penggunaan sumber daya, perkiraan, *output*, dan *outcome*. Badan pemerintah juga harus memastikan kebijakan yang jelas tentang bagaimana menghadapi permasalahan dimasyarakat, dan layanan yang diberikan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dibutuhkan keterlibatan para pemangku kepentingan secara efektif, termasuk warga negara dan pengguna layanan. Adanya komunikasi dan

konsultasi yang seimbang antara *stakeholder* yang bebas dalam memberikan masukan dan pandangannya.

Entitas sektor publik perlu bekerja sama dengan para pemangku kepentingan secara kelembagaan untuk meningkatkan pelayanan dan hasil, atau karena alasan akuntabilitas.

Mengembangkan kemitraan formal dan informal dengan pihak lain, memungkinkan entitas untuk menggunakan sumber daya mereka secara lebih efisien dan mencapai hasil secara lebih efektif. Selain persyaratan dalam Prinsip A dan B untuk bertindak demi kepentingan publik setiap saat, mencapai *good governance* di sektor publik juga memerlukan;

3. *Defining outcomes in terms of sustainable economic, social, and environmental benefits.*

Entitas sektor publik perlu mempertimbangkan gabungan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari semua kebijakan rencana, dan keputusan yang diambil. Adanya perencanaan jangka panjang dan tanggung jawab dibuat secara jelas dan hasil dari perencanaan harus selalu ditetapkan. Masukan dari warga, pengguna jasa, *stakeholder* kelembagaan, dan lain-lain sangat penting untuk keberhasilan proses ini.

4. *Determining the interventions necessary to optimize the achievement of the intended outcomes*

Entitas sektor publik membutuhkan mekanisme pengambilan keputusan yang kuat menyediakan kombinasi intervensi hukum, peraturan, dan pelaksanaan untuk memastikan bahwa hasil dapat dicapai dengan cara mengoptimalkan input sumber daya yang terbatas untuk hasil yang optimal. Intervensi ini dapat dilakukan antara lain dengan cara perbandingan informasi dari lembaga lain, intervensi pelayanan dan aturan yang jelas, perencanaan strategis, penganggaran, dan menghitung risiko dari setiap kebijakan. Keputusan yang dibuat perlu ditinjau terus-menerus untuk memastikan bahwa pencapaian hasil dioptimalkan.

5. *Developing the entity's capacity, including the capability of its leadership and the individuals within it.*

Entitas sektor publik membutuhkan struktur organisasi dan kepemimpinan yang tepat, serta orang-orang dengan pola pikir dan keterampilan yang maju, untuk beroperasi secara efisien dan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan dalam jangka waktu yang tertentu. Entitas sektor publik diperkuat dengan partisipasi seluruh anggota masyarakat dengan berbagai jenis latar belakang yang mencerminkan struktur masyarakat.

6. *Managing risks and performance through robust internal control and strong public financial management.*

Manajemen risiko dan kinerja yang dilakukan dalam sektor publik adalah melalui pengendalian internal dan pengelolaan keuangan publik yang kuat. Sebuah sistem yang kuat dari manajemen keuangan sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan sektor publik dan pencapaian hasil yang diharapkan melalui menegakkan disiplin keuangan, alokasi strategis sumber daya, pelayanan yang efisien, dan akuntabilitas.

7. *Implementing good practices in transparency, reporting, and audit, to deliver effective accountability.*

Akuntabilitas yang efektif yang bersangkutan tidak hanya dengan melaporkan tindakan selesai dilakukan tetapi memastikan *stakeholder* mampu memahami dan menanggapi sebagai rencana entitas dan melaksanakan kegiatannya secara terbuka.

## 2.2 Efektivitas Fungsi Audit Internal

Referensi [13] menyatakan: "*Effectiveness refers to the accomplishment of objectives whereas efficiency refers to resources use to achieve those objectives. An example of effectiveness is production of parts without defects*". Sedangkan definisi efektivitas menurut referensi [14] adalah: "*Effectiveness emphasize the actual production of an effect or the power to produce a given effect. Something maybe effective without being efficient and economical. Yet a program to make a sistem more efficient or economical may also turn out to be more effective*".

Referensi [15] memuat Menurut *International Standard on Auditing (ISA) 610 (2009)*, "*Using the Work of Auditor Internals*", sasaran / tujuan dari Fungsi Audit Internal adalah bervariasi luasnya

tergantung pada ukuran dan struktur dari suatu entitas dan kebutuhan manajemen. Aktivitas audit internal meliputi aktivitas sebagai berikut:

1. Memonitor pengendalian intern. Fungsi audit internal memiliki tanggungjawab khusus untuk mereviu pengendalian, memonitor/mengawasi operasi dan merekomendasikan perbaikannya.
2. Menguji (*examination*) informasi keuangan dan operasi. Fungsi audit internal ditujukan untuk mereviu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi keuangan dan operasi.
3. Mereviu aktivitas operasi. Fungsi audit internal ditujukan untuk mereviu ekonomi, efisiensi dan efektivitas aktivitas operasi, termasuk aktivitas *non financial* pada suatu entitas.
4. Mereviu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
5. Membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi exposure yang signifikan terhadap risiko dan mengkontribusikannya untuk perbaikan manajemen risiko dan sistem pengendalian.
6. Menilai *governance process* dalam memenuhi tujuan etika dan nilai, kinerja manajemen dan akuntabilitas, mengkomunikasikan risiko dan mengontrol informasi pada suatu area dalam organisasi dan efektivitas komunikasi di antara *governance*, auditor eksternal dan internal, dan manajemen.

Menurut referensi [16] fungsi audit internal yang efektif harus memiliki karakteristik independen, mempunyai staf yang kompeten, dan didukung sumber daya yang memadai. Menurut Hermanson, *et al.* (2008), audit internal berjalan efektif apabila:

1. Ada hal baru yang bisa dipelajari dari laporan audit internal.
2. Auditor internal sebagai pelaku utama dalam memberi saran untuk organisasi.
3. Temuan dan rekomendasi auditor internal telah dikomunikasikan kepada manajemen secara tepat waktu dan dapat dipahami dan memberikan nilai tambah perubahan dalam organisasi.
4. Kepala audit internal berkomunikasi dengan baik dengan komite audit,

disegani oleh manajemen dan auditor eksternal.

5. Auditor internal bekerja meningkatkan pemahaman tentang organisasi, pengendalian intern dan risiko.
6. Auditor internal responsif terhadap permintaan komite audit untuk bekerja di area tertentu yang berisiko.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus; kedua, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kota; dan keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Kota.

### 2.3 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut referensi [17] laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai akurasi laporan keuangan dalam menyampaikan informasi tentang operasi perusahaan, khususnya terhadap arus kas yang diharapkan, agar investor dapat mengambil keputusan investasi. Referensi [18] menjelaskan lingkup pelaporan keuangan di dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* No. 1, *Objective of Financial Reporting by Business Enterprises* adalah sebagai berikut: "*Financial reporting includes not only financial statements but also other means of communicating information that relates, directly or indirectly, to the information provided by the accounting system – that is, information about an enterprise's resources, obligations, earning, etc*". Sedangkan referensi [19] menyatakan bahwa: "Pelaporan Keuangan mencakupi pula penyediaan informasi yang manajemen ingin

menyampaikan selain melalui statemen keuangan baik lantaran informasi tersebut wajib diungkapkan untuk memenuhi undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebiasaan maupun lantaran manajemen sendiri menganggap bahwa informasi tersebut bermanfaat bagi pihak luar dan berkehendak untuk mengungkapkannya secara sukarela, dengan demikian maka pelaporan keuangan meliputi penyampaian informasi yang wajib secara luas (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*)”.

Referensi [20] mengeluarkan *International Financial Reporting Standard (IFRS)* yang menjelaskan *Conceptual Framework For Financial Reporting*. Tujuan pelaporan keuangan berdasarkan *Conceptual Framework For Financial Reporting* tersebut adalah: “*The objective of general purpose financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions about providing resources to the entity. Those decisions involve buying, selling or holding equity and debt instruments, and providing or settling loans and other forms of credit.*”

Menurut referensi [20] tersebut, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas yang dilaporkan, yang berguna untuk investor dan kreditor dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya untuk entitas tersebut. Selanjutnya, menurut *International Publik Sektor Accounting Standards Board (IPSASB)* yang diterbitkan oleh *International Federation of Accountant (IFAC)* (2010), tujuan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: “*The objectives of financial reporting by publik sektor entities are to provide information about the entity that is useful to users of GPFs for accountability purposes and for decision-making purposes (hereafter referred to as “useful for accountability and decision-making purposes”.*

Standar Akuntansi Pemerintahan / SAP (2010) yang telah menyesuaikan dengan *International Public Sektor Accounting Standards / IPSAS* (2010), menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial,

maupun politik. Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan yang berkualitas adalah pelaporan keuangan yang menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna, lengkap, transparan dan tidak menyesatkan, dan memenuhi karakteristik informasi keuangan yang berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Karakteristik informasi yang berkualitas yang dimaksud dalam tujuan umum pelaporan keuangan, yang terdapat dalam *Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Publik Sektor Entities* yang dikeluarkan oleh *International Publik Sektor Accounting Standards Board* (2010), yang merupakan dimensi dari kualitas pelaporan keuangan telah diadopsi dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah menyesuaikan dengan *International Publik Sektor Accounting Standards (IPSAS)* (2010), menyebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dimensi pelaporan keuangan yang berkualitas berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2010) tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan, indikatornya: (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu; (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini; (c) Tepat waktu, artinya informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan; dan (d) Lengkap, artinya informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin,

mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

#### 2. Andal

Andal, artinya informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik atau indikator: (a) Penyajian Jujur, artinya informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan; (b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*), artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh; dan (c) Netralitas, artinya informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

#### 3. Dapat Dibandingkan

Dapat dibandingkan, artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Indikatornya: Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### 4. Dapat Dipahami

Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi.

Penelitian tentang cara mengukur kualitas pelaporan keuangan memiliki banyak variasi dan pengembangan. Penilaian empiris kualitas pelaporan keuangan juga dilakukan dengan konteks kekhususan dan preferensi di antara beberapa penilaian [21, 22]. Kualitas pelaporan keuangan diteliti secara tidak langsung dengan berfokus pada atribut yang diyakini mempengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti manajemen laba, penyajian kembali keuangan, dan ketepatan waktu [23]. Peneliti lain menghubungkan antara kualitas pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan, pengendalian internal, manipulasi pendapatan dan penipuan, dan pemerintahan yang miskin dan pengendalian internal mengurangi kualitas pelaporan keuangan [24,25]. Penelitian tentang kualitas pelaporan keuangan dengan karakteristik kualitatif disebutkan dalam beberapa literatur [26, 27, 28]

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek penelitian, populasi dan sampel.

Objek penelitian disebut juga sebagai unit pengamatan yaitu variabel penelitian atau sesuatu konstruk yang dapat menghasilkan karakteristik-karakteristik variabel dan sifat-sifat yang akan menjadi pusat perhatian peneliti [29]. Objek dalam penelitian ini adalah tata kelola pemerintahan, efektivitas audit intern dan kualitas laporan keuangan. Lokasi penelitian / unit analisis pada penelitian ini terdiri dari 8 kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Unit observasinya yaitu Inspektorat Pemerintah Daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) serta SKPD pada 8 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Teknik pengumpulan data untuk penelitian lapangan ini dilakukan dengan observasi dan wawancara serta memberikan daftar pertanyaan kepada sampel sebanyak 112 SKPD, dan kuesioner yang dikembalikan sebanyak 65 SKPD. Teknik pengumpulan data untuk penelitian lapangan ini dilakukan dengan observasi dan wawancara serta memberikan daftar pertanyaan dan pernyataan terstruktur kepada para responden. Data sekunder sebagai bahan perbandingan yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Data sekunder juga didapatkan

dari jurnal, literatur, laporan-laporan dari instansi yang terkait serta karya tulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### 3.2 Pengujian Data

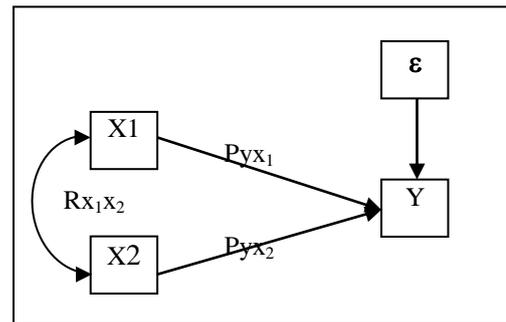
Uji validitas menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur [30]. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk mencapai sasarannya. Uji validitas di gunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut [31]. Uji validitas penelitian ini menggunakan rumus korelasi *product moment* yang dikemukakan oleh Pearson.

Uji reliabilitas data penelitian ini menggunakan metode (rumusan) koefisien *Alpha Cronbach's*. koefisien *Alpha Cronbach's* merupakan koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan dengan alasan koefisien ini menggambarkan varians dari item-item sekaligus untuk mengevaluasi *internal consistency*, dengan rumus sesuai referensi [32] Nilai batas yang digunakan untuk derajat reliabilitas adalah *Cronbach's Alpha* [29]. Patokan yang umumnya telah diterima secara luas adalah bentuk indikator yang mendapat koefisien lebih besar dari 0,70 dinyatakan reliabel, walaupun angka tersebut bukanlah angka mati. Hal ini berarti, apabila penelitian yang dilakukan bersifat *eksplanatory*, maka nilai di bawah 0,70 sebetulnya masih dapat diterima, sepanjang masih disertai alasan-alasan empirik yang terlihat dalam proses eksplorasi. Untuk mempermudah proses perhitungan, maka digunakan alat bantu komputer dengan *software* dengan aplikasi statistik SPSS 21 *for windows*.

### 3.3 Metode Analisis Data

Untuk mengubah data dari ordinal ke interval menggunakan *method of successive interval* (MSI). Untuk mengukur seberapa besar pengaruh tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit intern terhadap kualitas laporan keuangan maka pengujian dilakukan dengan uji analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur digunakan dengan pertimbangan bahwa pola hubungan antar variabel dalam penelitian adalah bersifat korelatif dan kausalitas.

Struktur hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen dengan diagram jalur seperti pada gambar berikut :



Gambar 3.1. Struktur Path Analysis

Keterangan :

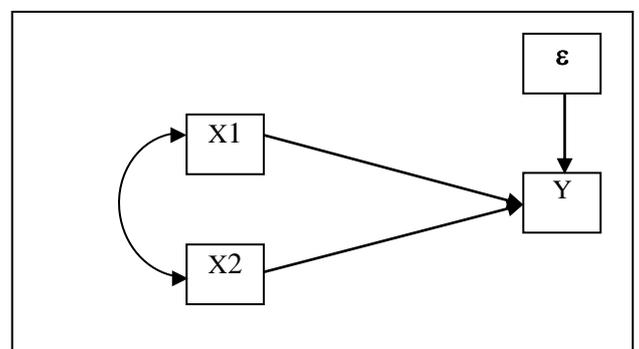
X1	=	Tata Kelola Pemerintahan
X2	=	Efektivitas Audit Intern
Y	=	Kualitas Laporan Keuangan
ε	=	Variabel lainnya yang mempengaruhi Y

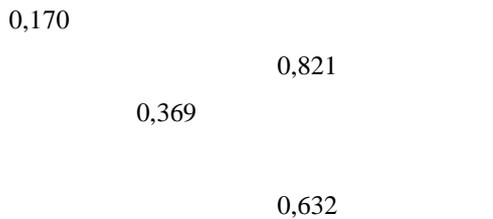
## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Untuk menjawab hipotesis penelitian mengenai pengaruh tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit intern terhadap kualitas laporan keuangan digunakan analisis jalur. Data penelitian untuk variabel yang diteliti dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala ukur ordinal. Sehingga untuk memenuhi syarat data yang digunakan dalam perhitungan analisis jalur sekurang-kurangnya mempunyai tingkat pengukuran interval. Data hasil tanggapan responden melalui kuesioner penelitian terlebih dahulu ditransformasikan menjadi skala ukur interval menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI).

Variabel tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit intern dalam penelitian ini sebagai variabel penyebab (eksogenus variabel) dan variabel kualitas laporan keuangan sebagai variabel akibat (endogenus variabel). Dari hasil penelitian diperoleh hasil perhitungan koefisien jalur seperti terlihat pada persamaan struktur jalur berikut  $Y = 0.821 X_1 + 0.632 X_2 + \varepsilon_1$





Gambar 4.1. Hasil Koefisien Jalur Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan (X1) dan efektivitas audit internal (X2) Terhadap kualitas laporan keuangan (Y)

Dari hasil penelitian diketahui koefisien jalur untuk pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan ( $P_{yx1}$ ) bertanda positif dengan nilai sebesar 0.632. Koefisien jalur untuk pengaruh efektivitas audit intern terhadap kualitas laporan keuangan ( $P_{yx2}$ ) bertanda positif dengan nilai sebesar sebesar 0.632.

Dari persamaan di atas dapat diartikan bahwa setiap peningkatan tata kelola pemerintahan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0.821 satuan. Setiap peningkatan efektivitas audit intern sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan efektivitas audit intern sebesar 0.632 satuan.

**Pengujian Koefisien Jalur Secara Simultan.**

Untuk menjawab permasalahan penelitian apakah tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit intern secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara statistik hipotesis dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut :

$H_0 : \rho_{YXi} = 0$  Tidak terdapat pengaruh tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit intern secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan.

$H_1 : \rho_{YXi} \neq 0$  Terdapat pengaruh tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit intern secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan .

Pengujian hipotesis tersebut dilakukan melalui statistik uji F. Penentuan hasil pengujian (penerimaan  $H_1$  atau penolakan  $H_0$ ) dapat dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$ .  $H_0$  ditolak; terdapat pengaruh tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit intern secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi berdasarkan pada hasil pengujian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan (nyata) secara bersama-sama antara tata kelola

pemerintahan dan efektivitas audit intern secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan.

**Pengujian Koefisien Jalur Secara Parsial.**  
Setelah prosedur pengujian simultan  $H_0$  ditolak, dan disimpulkan terdapat pengaruh secara bersama-sama, selanjutnya dilakukan pengujian parsial untuk melihat kebermaknaan (*signifikansi*) pengaruh X1, X2 secara parsial terhadap Y. Pengujian dilakukan menggunakan statistik uji t. Nilai  $t_{hitung}$  diperoleh dari hasil perhitungan dengan bantuan software SPSS 21 Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat perbandingan nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$ .  $H_0$  ditolak jika diperoleh nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$ . Nilai tabel t untuk tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas adalah 1.671. Hasil perbandingan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  dapat dilihat pada tabel berikut :

Hipotesis 1 :  $H_0$  ditolak; terdapat pengaruh positif tata kelola pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hipotesisi 2 :  $H_0$  ditolak; terdapat pengaruh positif efektivitas audit intern terhadap kualitas laporan keuangan.

**Pengujian Hipotesis 1 : Pengaruh Tata kelola Pemerintahan (X1) Secara Parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)**

Pengaruh tata kelola pemerintahan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan ditunjukkan oleh koefisien jalur  $\rho_{YX1}$  sebesar 0.821. Hasil perhitungan diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 8.446.

Hipotesis :

$H_0 : \rho_{YX1} = 0$  Tidak terdapat pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan

$H_1 : \rho_{YX1} \neq 0$  Terdapat pengaruh positif tata kelola pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan

Hasil uji empiris menyatakan penolakan terhadap  $H_0$  atau dengan kata lain uji signifikan dan berarti hipotesis  $H_1$  diterima. Keputusan ini diambil karena diperoleh  $t_{hitung} = 8.446 > t_{tabel} = 1.671$  dan nilai signifikansi untuk X1 lebih kecil dari 0.05. Dari hasil pengujian hipotesis parsial untuk variabel X1 dapat dinyatakan terdapat pengaruh positif signifikan dari tata kelola pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengujian Hipotesis 2 : Pengaruh efektivitas audit intern (X2) Secara Parsial Terhadap Kualitas laporan keuangan (Y)

Pengaruh efektivitas audit intern secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan ditunjukkan oleh koefisien jalur  $p_{YX2}$  sebesar 0.632. Hasil perhitungan diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 6.756.

Hipotesis :

$H_0 : \rho_{YX2} = 0$  Tidak terdapat pengaruh efektivitas audit intern terhadap kualitas laporan keuangan.

$H_1 : \rho_{YX2} \neq 0$  Terdapat pengaruh positif efektivitas audit intern terhadap kualitas laporan keuangan

Hasil uji empiris menyatakan penolakan terhadap  $H_0$  atau dengan kata lain uji signifikan dan berarti hipotesis  $H_1$  diterima. Keputusan ini diambil karena diperoleh  $t_{hitung} = 6.757 > t_{tabel} = 1.671$ . Dari hasil pengujian hipotesis parsial untuk variabel X2 dapat dinyatakan terdapat pengaruh positif signifikan dari efektivitas audit intern terhadap kualitas laporan keuangan. Besarnya pengaruh simultan tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit intern terhadap kualitas laporan keuangan ditunjukkan dengan nilai R-square ( $R^2$ ) yaitu sebesar 0.624 atau 62.4%.

Tabel 4.1  
Besaran Koefisien Jalur

Variabel	Koefisien Jalur	Pengaruh Secara Bersamaan	Pengaruh Residu
Tata kelola pemerintahan (X1)	$P_{yx1} = 0.821$	0.624	0.376
Efektivitas audit intern (X2)	$P_{yx2} = 0.632$		

Sumber, Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat total pengaruh variabel tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit intern adalah sebesar 0.624 atau 62.4%, sedangkan pengaruh faktor lainnya terhadap kualitas laporan keuangan ditunjukkan dengan nilai 0.376 atau 37.6%. Dengan kata lain, variabel kualitas laporan keuangan sebesar 62.4% oleh variabel tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit intern. Sisanya sebesar 37.6% variabel kualitas laporan keuangan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pengaruh Parsial Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan tata kelola pemerintahan mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara parsial. Berdasarkan nilai korelasi dan koefisien jalur yang diperoleh dapat diketahui besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung tata kelola pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3  
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh	Besar Kontribusi
Pengaruh langsung terhadap Y $P_{yx1} P_{yx1}$ (0.821 x 0.821)	0.674 atau 67,4%
Pengaruh tidak langsung terhadap Y melalui X2 $P_{yx1} r_{x1x2} P_{yx2}$ (0.821 x 0.369 x 0,632)	0.191 atau 19,1%
<b>Total Pengaruh</b>	<b>86,8%</b>

Sumber. Hasil Penelitian, 2019

Hasil yang diperoleh jika dilihat secara langsung tanpa adanya variabel lain menunjukkan tata kelola pemerintahan mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 67,4% dan nilai pengaruh tidak langsung dari efektivitas audit intern adalah sebesar 19,1%. Melalui efektivitas audit intern total pengaruh secara parsial tata kelola pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 86,8%.

Pengaruh Efektivitas Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh efektivitas audit intern terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial. Berdasarkan nilai korelasi dan koefisien jalur yang diperoleh dapat diketahui besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung efektivitas audit intern terhadap kualitas laporan keuangan pada tabel dibawah ini

Tabel 4.2  
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Efektivitas Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh	Besar Kontribusi
Pengaruh langsung terhadap Y $P_{yx1} P_{yx1}$ (0.632 x 0.632)	0.399 atau 39,9%
Pengaruh tidak langsung X2	0.191 atau

Terhadap Y melalui X1 19,1%  
 $P_{yx1} r_{x1x2} P_{yx2}$   
 (0.632 x 0.369 x 0,632)

Total Pengaruh 59,0%

Sumber. Hasil Penelitian, 2019

Hasil yang diperoleh jika dilihat secara langsung tanpa adanya variabel lain menunjukkan efektivitas audit intern mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 39.9%. Melalui tata kelola pemerintah, total pengaruh secara parsial efektivitas audit intern terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 59.0%.

#### 4.2 Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang ingin dicapai yakni untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tata kelola pemerintahan, efektivitas audit intern terhadap kualitas laporan keuangan, baik secara simultan maupun secara parsial telah dilakukan penelitian dan dapat diinterpretasikan seperti pada pembahasan berikut ini.

Dari hasil penelitian diperoleh koefisien determinasi (*R-Square*) sebesar 62,4%, sedangkan faktor lain yang mempengaruhi adalah sebesar 37,6%. Ini berarti bahwa variabel tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit intern secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara pengaruh variabel lain yang tidak diteliti sebesar 37.6% seperti, komitmen organisasi, desentralisasi, dan faktor lainnya.

Pengaruh tata kelola pemerintahan Terhadap kualitas laporan keuangan:

Tata kelola pemerintahan dihipotesiskan memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien jalur dari variabel tata kelola pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 0.821. Selanjutnya nilai  $t_{hitung}$  koefisien jalur dari variabel tata kelola pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 8.446. Karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ , maka disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Utara. Artinya semakin tinggi tata kelola pemerintahan, maka akan meningkatkan

kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa penerapan tata kelola pemerintah berpengaruh positif secara langsung terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang telah dibangun dan memberikan bukti empiris bahwa semakin baik penerapan tata kelola pemerintah dilaksanakan maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan tata kelola pemerintah akan menaikkan kualitas pelaporan keuangan.

Pengaruh Efektivitas audit intern terhadap kualitas laporan keuangan

Efektivitas audit intern dihipotesiskan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Besarnya koefisien jalur dari variabel efektivitas audit intern terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 0.632. Nilai koefisien jalur bertanda positif menunjukkan audit intern yang makin efektif akan membuat kualitas laporan keuangan semakin baik. Selanjutnya nilai  $t_{hitung}$  koefisien jalur dari variabel efektivitas audit intern terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 6.757. Karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka disimpulkan bahwa efektivitas audit intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas audit intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa efektivitas fungsi audit internal berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kualitas pelaporan keuangan melalui tingkat kecurangan dengan kekuatan pengaruh sebesar 0,373. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang telah dibangun dan memberikan bukti empiris bahwa semakin baik efektivitas fungsi audit internal dilaksanakan maka akan semakin menurunkan tingkat kecurangan. Semakin rendah tingkat kecurangan maka semakin dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan semakin baik efektivitas fungsi audit internal akan menaikkan kualitas pelaporan keuangan.

Penyataan di atas sesuai dengan teori bahwa audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan *control*

yang berbeda-beda dalam organisasi antara lain untuk menentukan apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan (Sawyer, 2003). Arens dan Loebbecke (2014) juga mengungkapkan bahwa fungsi audit internal yang efektif (dengan auditor internal yang independen, kompeten, dan terlatih), akan mencapai pelaporan keuangan yang berkualitas. Arens dan Loebbecke (2014) juga menyatakan bahwa di dalam audit internal, internal auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar.

## 5. KESIMPULAN

Merujuk pada pengujian hipotesis, hasil analisis pembahasan serta temuan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Secara parsial tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Utara. Hal ini dapat diartikan dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berhubungan serta pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Semakin baik efektivitas fungsi audit internal dilaksanakan maka akan semakin menurunkan tingkat kecurangan, maka semakin dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan semakin baik efektivitas fungsi audit internal akan menaikkan kualitas pelaporan keuangan.

2. Penerapan tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit intern secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan tata kelola yang baik berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kualitas pelaporan keuangan melalui efektivitas audit intern. Penerapan prinsip dalam tata kelola yang baik akan dapat mengurangi kecurangan.

Banyaknya temuan penyimpangan dan kecurangan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, dapat mengurangi kualitas atas laporan keuangan pemerintah. Sehingga penerapan tata kelola berpengaruh kualitas pelaporan keuangan. Efektivitas fungsi audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan. Fungsi audit internal yang efektif yang ditunjukkan dengan kualitas audit yang baik, kemampuan profesional audit internal, pengaturan organisasi dan kontribusi nilai tambah dari audit internal, dapat mendeteksi kecurangan. Semakin efektif pelaksanaan audit intern semakin berkualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Penerbit Erlangga
- [2] Hadi, Adi Priyo. 2005. Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada kabupaten dan kota se Jawa-Bali). *Jurnal interdisipliner kritis UKSW*.
- [3] .Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2017. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara – Semester II.
- [4] Lembaga Administrasi Negara, 2010. *Akuntabilitas dan Good Governance*, Penerbit LAN, Jakarta
- [5] Taufikul Ichsan dkk. 2014. *Epigram*, Vol. 10 No. 2 Oktober 2014:64-74 .Peran Akuntan Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Organisasi Sektor Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Organisasi
- [6] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2017. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara – Semester II
- [7] Stoker, G. 1998. *Governance as theory: five propositions*, *International Journal of Social Sciences*. 50, 1, 17–28.
- [8] Lembaga Administrasi Negara, 2010. *Akuntabilitas dan Good Governance*, Penerbit LAN, Jakarta
- [9] United Nations Development Program (UNDP). 1997.

- Governance for Suitable Development – A Policy Document.* New York: UNDP.
- [10] Asian Development Bank (ADB). 1999. *Governance : Sound Development Management.* <http://www.ggg.co.id>.
- [11] World Bank, 2015. The Worldwide Governance Indicators (WGI) project
- [12] International Federation of Accountants 2014. *International Framework: Good Governance In The Public Sector*, July 2014 By IFAC And CIPFA ISBN: 978-1-60815-181-3
- [13] Arens, A.A., Elder, R.J. and Beasley, M.S. 2014. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*, 14<sup>th</sup> Edition, Pearson, Prentice Hall Inc.
- [14] Sawyers, L.B., Mortimer A.D. and James, H.S. 2003. *Sawyer's Internal Auditing, The Practice of Modern internal Auditing.* Florida; The Institute of Internal Auditors. Altamonte Springs
- [15] International Standard on Auditing 610. 2009. *Using the Work of Internal Auditors, International Standard on Auditing (ISA) 610, available at: www.ifac.org (accessed 30 July 2009).*
- [16] Tugiman, Hiro. 2004. Standar Profesi Audit Internal. *YPIA, Jakarta.*
- [17] Kieso, D.E., Weygandt, J.J. and Warfield, T.D. 2012. *Intermediate Accounting.* John Wiley & Sons. Inc.
- [18] Belkaoui, A.R. 2012. *Accounting Theory.* Thomson Learning. London.
- [19] Suwardjono. 2010. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan.* Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
- [20] International Accounting Standards Boards. 2010. *International Financial Reporting Standard (IFRS).* International Accounting Standards Boards
- [21] Dechow, P. M., R.G. Sloan and A.P. Sweeney. 1996. Causes and Consequences of Earnings manipulation: An Analysis of Firms Subject to enforcement actions by the SEC. *Contemporary Accounting Research* 13 (Spring): 1-36
- [22] Botosan, C. 2004. Discussion of a framework for the analysis of risk communication. *The International Journal of Accounting*, 39(3), 289-295.
- [23] Cohen, D.A. and Sayag, G. 2010. The Effectiveness of Internal Auditing: An Empirical Examination of its Determinants in Israeli Organisations. *Australian Accounting Review* No. 54 Vol. 20, Issue 3.
- [24] Dechow, P. M., R.G. Sloan and A.P. Sweeney. 1996. Causes and Consequences of Earnings manipulation: An Analysis of Firms Subject to enforcement actions by the SEC. *Contemporary Accounting Research* 13 (Spring): 1-36
- [25] McMullen, D.A. 1996. Audit committee performance: An investigation of the consequences associated with audit committees. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* (Fall): 1 -28
- [26] Van Beest, F., Braam, G., and Boelens, S. 2009. Quality of Financial Reporting: measuring qualitative characteristics. *Nijmegen Center for Economics (NiCE). Working Paper*, 09-108.
- [27] Jonas, G. and Blanchet, J. 2000. Assessing quality of financial reporting. *Accounting Horizons*, vol. 14, no. 3, pp. 353-363.
- [28] McDaniel, L., Martins, R. and Maines, L. 2002. *Evaluating Financial Reporting Quality: The Effects of Financial Expertise vs. Financial Literacy.* The Accounting Review, 77: 139-167.
- [29] Sekaran, Uma and Roger Bougie. 2013. *Research Method for Business. A Skill Building Approach. Fourth Edition.* New York : John Miley and Sons, Inc
- [30] Jogiyanto, H.M. and Abdillah, W., 2009. Konsep dan aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk penelitian empiris. BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yogyakarta.

- [31] Ghozali, Imam.2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro : Semarang
- [32] Riduwan, 2008. Cara menggunakan dan memaknai analisis jalur. Penerbit Alfabeta Bandung